

# Mewujudkan Pengelolaan Amanah: Pendampingan Pelaporan Keuangan Berbasis ISAK 335 untuk Tata Kelola Pesantren yang Berkelanjutan

Warka Syachbrani\*, Lukman Dahlan, Alia Rezki Amalia, Irene Ipal Parinding & Nur Abshari Abbas

Accounting Departemen, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

## Abstrak

Sebagian besar pondok pesantren di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus yayasan dan pengelola keuangan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurussunnah Bulukumba mengenai pelaporan keuangan berbasis Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 sebagai upaya mewujudkan tata kelola pesantren yang berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan dalam satu sesi setengah hari yang diikuti oleh 30 peserta, bertempat di Ruang Pertemuan Kahayya, Gedung Pini Bulukumba. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang dikombinasikan dengan pendekatan Community Development, dengan menekankan keterlibatan aktif peserta melalui sesi pemaparan materi dan diskusi. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan ISAK 335, urgensi laporan keuangan bagi pesantren, klasifikasi aset neto, serta lima komponen laporan keuangan entitas nonlaba. Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya laporan keuangan yang terstandar, serta munculnya kesadaran baru bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan amanah lembaga. Kegiatan ini memperkuat tata kelola kelembagaan pesantren dan membuktikan efektivitas pendekatan PAR dalam mendorong perubahan kapasitas dan kesadaran pengelolaan keuangan lembaga nonlaba berbasis komunitas.

*Keywords:* ISAK 335; Laporan Keuangan; Pesantren; Tata Kelola; Pengabdian Masyarakat.

## 1. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan terbesar di Indonesia yang telah memainkan peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa, pengembangan nilai-nilai keislaman, serta pemberdayaan masyarakat secara luas. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat 39.043 pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun ajaran 2022/2023, dengan total santri lebih dari empat juta jiwa (Kementerian Agama RI, 2023). Angka ini menegaskan posisi pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai institusi sosial-kemasyarakatan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan pesantren yang masif dan tersebar merata hingga ke pelosok daerah menjadikannya pilar penting dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus agen pemberdayaan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan akar rumput.

Namun di balik peran besarnya, pesantren sebagai lembaga berbasis komunitas dan orientasi nonlaba menghadapi tantangan serius dalam aspek tata kelola keuangan. Sebagian besar pesantren, terutama yang berskala kecil dan menengah, masih mengelola keuangan secara konvensional dan sederhana tanpa mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Pencatatan transaksi sering kali dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan internal, tanpa pembukuan yang sistematis dan tanpa pemisahan yang jelas antara dana lembaga, dana waqaf, dana donasi, dan aset pribadi pengurus. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya sumber daya manusia di pesantren yang memiliki latar belakang dan kompetensi di bidang akuntansi (Arliansyah et al., 2024). Lemahnya literasi keuangan di kalangan pengelola pesantren berdampak langsung pada rendahnya kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya mengancam akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap organisasi, termasuk lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan tidak hanya berfungsi

<sup>1</sup> Corresponding author:  
E-mail address: xxxx@xxxxxx.edu

sebagai pertanggungjawaban kepada para pemberi dana donatur, wali santri, dan masyarakat tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan strategis dan perencanaan keberlanjutan lembaga. Penelitian Safitri dan Narasti (2023) pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya menemukan bahwa meskipun pesantren tersebut dapat dikategorikan akuntabel secara substantif, laporan keuangannya belum menerapkan standar akuntansi ISAK 35 secara formal. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan pentingnya akuntabilitas belum selalu diiringi dengan kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menetapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Standar ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dan menggantikan PSAK 45 yang sebelumnya digunakan. ISAK 35 mengatur secara komprehensif penyajian, pengungkapan, dan pencatatan transaksi keuangan entitas nonlaba, termasuk pesantren, yayasan pendidikan, masjid, dan lembaga amil zakat (Listiyowati, 2021). Dengan berlakunya standar ini, seluruh entitas berorientasi nonlaba di Indonesia termasuk pesantren yang berbadan hukum yayasan memiliki acuan yang jelas dan terstandar dalam menyusun laporan keuangan. Namun, sosialisasi dan implementasi ISAK 35 di kalangan lembaga pendidikan keagamaan masih sangat terbatas, sehingga dibutuhkan upaya aktif dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong penerapannya.

Sejumlah kajian terdahulu telah mengkonfirmasi adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan standar akuntansi dan praktik pelaporan keuangan di lembaga nonlaba berbasis keagamaan. Baitus Salamah et al. (2023) dalam penelitiannya pada Pondok Pesantren Az-Zabur Kajen Kabupaten Pekalongan menemukan bahwa masih banyak organisasi nonlaba di Indonesia, termasuk pesantren, yang belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 akibat keterbatasan pengetahuan pengelolanya. Senada dengan itu, Listiyowati (2021) menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan pesantren masih menghadapi hambatan, baik dari faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, maupun faktor eksternal berupa belum optimalnya penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sementara itu, Muthya et al. (2024) dalam kegiatan pengabdian di Masjid Atlas Bandung menunjukkan bahwa pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 35 secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi nonlaba, sekaligus membuktikan efektivitas model pendampingan berbasis perguruan tinggi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 35 pada lembaga nonlaba mulai banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Arliansyah et al. (2024) melaksanakan pelatihan pengelolaan dan pelaporan keuangan di Pondok Pesantren Darul Falah, Aceh Utara, dan hasilnya menunjukkan bahwa setelah pelatihan dua hari, peserta mampu memahami dan menyusun seluruh komponen laporan keuangan sesuai ISAK 35, meskipun pendampingan lanjutan masih sangat dibutuhkan untuk memastikan penerapan secara mandiri. Temuan serupa dilaporkan oleh Purba et al. (2023) yang melaksanakan sosialisasi ISAK 35 pada panti asuhan, di mana keterlibatan aktif peserta selama pelatihan menjadi indikator utama keberhasilan transfer pengetahuan. Hasil-hasil pengabdian tersebut menegaskan bahwa model pelatihan dan pendampingan langsung merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan lembaga nonlaba, termasuk pesantren, yang selama ini belum terjangkau oleh layanan konsultasi keuangan profesional.

Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurussunnah yang berlokasi di Bulukumba, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu representasi dari ribuan pesantren di Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian, pengelolaan keuangan pesantren ini masih dilakukan secara sederhana tanpa mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Pencatatan keuangan tidak dilakukan secara sistematis dan belum menggunakan format laporan yang terstandar, sehingga menyulitkan penyajian informasi keuangan yang transparan kepada pemangku kepentingan, termasuk donatur, wali santri, dan masyarakat. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara jenis-jenis aset dan sumber dana berdasarkan klasifikasi pembatasan sebagaimana disyaratkan oleh ISAK 35 menjadi salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas lembaga dan berpotensi menghambat keberlanjutan program pendidikan dan sosial yang dijalankan oleh pesantren.

Dibandingkan dengan kajian-kajian pengabdian sebelumnya yang umumnya dilaksanakan di Pulau Jawa dan Sumatera, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam memperluas jangkauan implementasi ISAK 35 ke wilayah Sulawesi Selatan, khususnya pada lembaga pesantren di Kabupaten Bulukumba. Kebaruan kegiatan ini juga terletak pada penggunaan ISAK 335 yang merupakan penyebutan terbaru dan pembaruan dari ISAK 35 dalam konteks SAK Indonesia yang berlaku efektif 1 Januari 2024 sebagai basis pendampingan, sehingga materi yang diberikan lebih mutakhir dan relevan dengan perkembangan regulasi akuntansi terkini. Selain itu, format kegiatan yang menggabungkan pelatihan teoritis pada hari pertama dengan pendampingan praktik langsung pada hari kedua dirancang untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mulai menerapkannya dalam konteks lembaga masing-masing.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) memberikan pemahaman dasar yang komprehensif kepada pengurus yayasan dan pengelola keuangan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurussunnah Bulukumba mengenai pentingnya laporan keuangan yang akuntabel dan berbasis standar; (2) mendampingi peserta dalam menyusun komponen-komponen laporan keuangan sesuai ISAK 335, meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; serta (3) memperkuat tata kelola kelembagaan pesantren menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan, profesional, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung keberlanjutan misi pendidikan dan sosial pesantren dalam jangka panjang.

Pendahuluan harus memuat latar belakang berupa akar masalah dan pentingnya (urgensi) kegiatan pengabdian dilakukan. Latar belakang dapat bersumber dari masalah (problem) yang bersifat aktual yang terjadi di sekelompok masyarakat atau komunitas tertentu atau fenomena yang terjadi dari hasil pengamatan (observasi) di lapangan yang membutuhkan tindakan solutif melalui pengabdian berbasis penelitian (riset). Pendahuluan juga harus menuliskan kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel pengabdian yang ditulis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan dilaksanakannya pengabdian berbasis riset tersebut dikaitkan dengan latar belakang dan kajian literatur yang telah dipaparkan sebelumnya. Penulisan sumber kutipan (referensi) dalam artikel jurnal ini menggunakan catatan tubuh (bodynote).

## 2. Metode

### 2.1. Pendekatan Pengabdian



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dikombinasikan dengan model Community Development. PAR dipilih karena memungkinkan komunitas dampingan dalam hal ini pengurus yayasan dan pengelola keuangan pesantren untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga refleksi hasil (Kemmis et al., 2014). Pendekatan ini tidak menempatkan masyarakat sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang turut merencanakan dan mengevaluasi perubahan

yang diharapkan. Dalam konteks pengabdian ini, partisipasi aktif peserta diwujudkan melalui keterlibatan dalam sesi tanya jawab dan diskusi langsung terkait persoalan nyata pengelolaan keuangan lembaga. Model PAR dipandang tepat karena permasalahan yang dihadapi bersifat kontekstual sehingga solusi yang ditawarkan perlu dirancang bersama komunitas, bukan diimposikan dari luar (Ife & Tesoriero, 2016). Diagram alur pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.

## 2.2. Subjek, Waktu, dan Lokasi Pengabdian

Subjek pengabdian adalah Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurussunnah yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pesantren ini dipilih sebagai mitra pengabdian berdasarkan hasil identifikasi awal yang menunjukkan adanya kebutuhan nyata dalam penguatan kapasitas pengelolaan keuangan lembaga sesuai standar akuntansi yang berlaku. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri atas pengurus yayasan dan pengelola keuangan pesantren.

Kegiatan dilaksanakan dalam satu sesi setengah hari bertempat di Ruang Pertemuan Kahayya, Gedung Pinisi Bulukumba. Tim pengabdian terdiri atas lima orang dosen dari Program Studi Akuntansi (S1), Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar (FEB UNM), dengan Warka Syachbrani sebagai ketua tim dan Lukman Dahlan, Alia Rezki Amalia, Irene Ipal Parinding, serta Nur Abshari Abbas sebagai anggota. Lukman Dahlan bertugas sebagai narasumber utama dalam sesi pelatihan.

## 2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pra-Kegiatan: Persiapan dan Koordinasi. Sebelum hari pelaksanaan, tim pengabdian melakukan serangkaian persiapan yang mencakup identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan pesantren melalui komunikasi awal dengan pengurus yayasan, penyusunan modul pelatihan berbasis ISAK 335 yang dilengkapi media visual infografis, serta koordinasi teknis terkait jadwal, tempat, dan konfirmasi peserta bersama pihak pesantren. Modul disusun secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan peserta yang sebagian besar tidak berlatar belakang akuntansi, dengan penyajian yang komunikatif dan mudah dipahami.



Gambar 2. Dokumentasi Pembukaan Kegiatan

Pelaksanaan: Pelatihan Materi dan Diskusi. Kegiatan dilaksanakan dalam satu sesi setengah hari yang mencakup pemaparan materi dan diskusi/tanya jawab. Narasumber utama, Lukman Dahlan, menyampaikan materi secara sistematis menggunakan media visual berbasis infografis yang mencakup lima pokok bahasan: (1) pengenalan ISAK 335 sebagai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi

nonlaba; (2) urgensi laporan keuangan bagi pesantren yang meliputi enam fungsi utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, pengambilan keputusan, peningkatan kepercayaan publik, kepatuhan terhadap standar, dan keberlanjutan program; (3) ruang lingkup pengguna ISAK 335 yang mencakup pesantren, yayasan, lembaga amil zakat, dan organisasi nirlaba lainnya; (4) klasifikasi aset neto yang terdiri atas aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen; serta (5) lima komponen laporan keuangan nonlaba sesuai ISAK 335. Sesi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang memungkinkan peserta menyampaikan secara langsung berbagai persoalan riil yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan lembaga.

Pasca-Kegiatan: Evaluasi. Setelah kegiatan selesai, tim pengabdian melakukan evaluasi secara kualitatif melalui pencatatan dinamika diskusi selama sesi berlangsung, observasi tingkat keaktifan dan antusiasme peserta, serta refleksi lisan peserta terhadap manfaat yang dirasakan. Pendekatan evaluasi kualitatif ini selaras dengan karakteristik PAR yang menekankan refleksi partisipatif sebagai bagian integral dari proses pengabdian (Burns, 2015).

#### 2.4. Materi Pelatihan

Materi pelatihan disusun oleh tim pengabdian berdasarkan ketentuan ISAK 335 yang diterbitkan oleh DSAK-IAI dan disajikan dalam format visual infografis untuk memudahkan pemahaman peserta. Secara keseluruhan, materi memuat lima pokok bahasan yang tersusun dari konsep umum menuju komponen teknis laporan keuangan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Materi Pelatihan Kegiatan Pengabdian

No.	Pokok Bahasan	Uraian Materi
1	Pengenalan ISAK 335	Definisi, tujuan, dan latar belakang ISAK 335 sebagai pedoman akuntansi entitas berorientasi nonlaba yang diterbitkan DSAK-IAI
2	Urgensi Laporan Keuangan Pesantren	Enam fungsi laporan keuangan: akuntabilitas, transparansi, pengambilan keputusan, kepercayaan publik, kepatuhan standar, dan keberlanjutan program
3	Ruang Lingkup Pengguna ISAK 335	Pesantren, yayasan, lembaga amil zakat, organisasi nirlaba, dan entitas berorientasi nonlaba lainnya
4	Klasifikasi Aset Neto	Tiga klasifikasi: aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen beserta contoh penerapannya pada konteks pesantren
5	Lima Komponen Laporan Keuangan	Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

#### 2.5. Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan terdiri atas dua jenis. Data primer diperoleh melalui: (1) observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung; (2) komunikasi awal dengan pengurus pesantren pada tahap persiapan; dan (3) dokumentasi berupa catatan lapangan, foto kegiatan, daftar hadir peserta, serta press rilis kegiatan. Data sekunder bersumber dari modul pelatihan yang disusun tim pengabdian, regulasi ISAK 335 oleh DSAK-IAI, serta literatur pengabdian terdahulu yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif mengacu pada model Miles dan Huberman (2014) melalui tiga alur: (1) reduksi data, yakni memilah dan memfokuskan data relevan dari catatan lapangan dan hasil observasi; (2) penyajian data, yakni mengorganisasikan informasi dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan proses dan capaian kegiatan; serta (3) penarikan kesimpulan, yakni pemaknaan terhadap temuan kegiatan yang dikaitkan dengan tujuan pengabdian dan landasan teori. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, catatan lapangan, dokumentasi foto, dan press rilis kegiatan

### 3. Hasil dan Diskusi atau Penamaan lainnya

#### 3.1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan pelaporan keuangan berbasis ISAK 335 berjalan dengan lancar dan kondusif. Seluruh 30 peserta yang terdiri atas pengurus yayasan dan pengelola keuangan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurussunnah Bulukumba hadir dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Tingkat kehadiran yang penuh ini mencerminkan kesadaran awal peserta terhadap pentingnya penguatan kapasitas pengelolaan keuangan lembaga mereka, sekaligus menunjukkan relevansi tema yang diangkat dengan kebutuhan riil yang dirasakan oleh komunitas.

Kegiatan dibuka dengan pemaparan materi oleh narasumber utama, Lukman Dahlan, yang menyampaikan pentingnya laporan keuangan sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi lembaga nonlaba. Dengan menggunakan media visual berbasis infografis, materi disampaikan secara bertahap dimulai dari pengenalan konsep ISAK 335, dilanjutkan dengan urgensi laporan keuangan bagi pesantren, ruang lingkup pengguna standar, klasifikasi aset neto, hingga

pengenalan lima komponen laporan keuangan. Pendekatan penyampaian yang komunikatif dan berbasis visual terbukti efektif dalam menjembatani konsep-konsep akuntansi yang bersifat teknis dengan pemahaman peserta yang sebagian besar tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi.



**Gambar 3.** Dokumentasi Kegiatan

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Berbagai persoalan riil yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan lembaga disampaikan secara terbuka. Dinamika diskusi yang terjadi mencerminkan adanya kebutuhan yang selama ini tidak tersalurkan yakni ruang untuk mendialogkan permasalahan keuangan lembaga dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Beberapa persoalan yang paling banyak diungkapkan peserta antara lain: kesulitan membedakan aset lembaga dengan aset pribadi pengurus, ketidakjelasan pencatatan sumber dana dari berbagai pihak seperti donatur, wali santri, dan infak jamaah, serta belum adanya format laporan keuangan yang baku dan konsisten digunakan di Lembaga

Kegiatan pengabdian ini menjalankan tiga bentuk aksi teknis yang saling melengkapi. Pertama, aksi edukasi melalui pemaparan materi ISAK 335 secara terstruktur yang memberikan fondasi pengetahuan kepada peserta tentang standar pelaporan keuangan yang seharusnya dianut oleh entitas nonlaba seperti pesantren. Kedua, aksi fasilitasi dialog melalui sesi diskusi yang membuka ruang bagi peserta untuk mengidentifikasi secara mandiri kesenjangan antara praktik pengelolaan keuangan yang selama ini dijalankan dengan ketentuan yang berlaku sesuai ISAK 335. Ketiga, aksi penguatan kapasitas melalui penyediaan modul pelatihan berbasis infografis yang dapat digunakan peserta sebagai referensi mandiri setelah kegiatan selesai, sehingga keberlanjutan transfer pengetahuan tidak berhenti pada hari pelaksanaan kegiatan saja.

Ketiga aksi teknis tersebut dirancang berdasarkan prinsip bahwa perubahan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui transfer pengetahuan searah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif komunitas dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya sendiri (Kemmis et al., 2014). Dalam hal ini, sesi diskusi menjadi jantung dari kegiatan, karena di sinilah proses kesadaran kritis peserta tentang kondisi riil pengelolaan keuangan lembaga mereka mulai terbentuk

Salah satu capaian paling signifikan dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran baru di kalangan peserta mengenai pentingnya laporan keuangan yang sistematis, terstandar, dan akuntabel. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memandang laporan keuangan semata-mata sebagai kewajiban administratif yang bersifat formalitas. Namun setelah mengikuti sesi pelatihan dan diskusi, persepsi tersebut mulai bergeser: peserta mulai memahami bahwa laporan keuangan adalah alat tata kelola yang esensial untuk membangun kepercayaan publik, mendukung keberlanjutan program, dan menegakkan prinsip amanah dalam pengelolaan dana pesantren.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan

"Kegiatan ini memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sistematis dan sesuai standar, terutama untuk mendukung transparansi pengelolaan dana pesantren dan yayasan." (Peserta Kegiatan).

Testimoni tersebut mencerminkan terjadinya pergeseran kognitif yang bermakna dari sekadar kesadaran bahwa laporan keuangan itu "perlu ada", menuju pemahaman yang lebih dalam bahwa laporan keuangan yang baik adalah fondasi dari tata kelola pesantren yang berkelanjutan. Pergeseran ini merupakan langkah awal yang krusial dalam proses transformasi sosial kelembagaan, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Freire (2000) sebagai proses *conscientization*, yakni tumbuhnya kesadaran kritis seseorang terhadap kondisi dirinya dan lingkungannya sebagai prasyarat tindakan transformatif.

Selain pergeseran persepsi, kegiatan ini juga mendorong munculnya komitmen untuk berubah di tingkat lembaga. Beberapa peserta secara aktif menyatakan keinginan untuk mulai menata ulang sistem pencatatan keuangan lembaga mereka berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian tidak sekadar menghasilkan peningkatan pengetahuan individual, tetapi juga memantik terbentuknya *agency* kolektif di dalam komunitas pesantren untuk memperbaiki praktik pengelolaan keuangan secara mandiri dan berkelanjutan

### 3.2. Diskusi

Relevansi ISAK 335 dalam Konteks Tata Kelola Pesantren Temuan kegiatan pengabdian ini menegaskan relevansi ISAK 335 sebagai instrumen strategis dalam penguatan tata kelola pesantren. Tingginya antusiasme peserta dan luasnya persoalan keuangan riil yang diangkat selama diskusi mengkonfirmasi bahwa kebutuhan akan standar pelaporan keuangan yang kontekstual bagi lembaga nonlaba keagamaan di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Kondisi ini sejalan dengan temuan Safitri dan Narasti (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun banyak pesantren telah memiliki kesadaran akan pentingnya akuntabilitas keuangan, sebagian besar belum menerapkan standar akuntansi secara formal dalam penyusunan laporan keuangan mereka.

ISAK 335, sebagai penyempurnaan dari PSAK 45, memberikan kerangka yang lebih komprehensif dan relevan untuk diterapkan pada entitas nonlaba seperti pesantren. Standar ini mengatur secara khusus klasifikasi aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan dari pemberi dana sebuah konsep yang sangat relevan dengan realitas pengelolaan dana pesantren yang berasal dari berbagai sumber dengan karakteristik pembatasan yang berbeda-beda, mulai dari donasi bebas hingga wakaf permanen. Listiyowati (2021) menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi yang tepat pada lembaga pendidikan keagamaan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas publik yang sejati, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Efektivitas Model Pelatihan Berbasis PAR. Dari perspektif metodologi pengabdian, kegiatan ini menunjukkan efektivitas pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam konteks penguatan literasi keuangan lembaga nonlaba. Sesi diskusi yang berlangsung dinamis dan partisipatif membuktikan bahwa ketika peserta diberikan ruang untuk menyuarakan permasalahan mereka sendiri, proses pembelajaran menjadi jauh lebih kontekstual, bermakna, dan berdampak dibandingkan pendekatan pelatihan konvensional yang bersifat satu arah. Hal ini selaras dengan argumen Ife dan Tesoriero (2016) bahwa model pengembangan komunitas yang efektif selalu bertolak dari kekuatan dan pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas, bukan dari defisit yang didefinisikan dari luar.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil pengabdian Muthya et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 35 pada organisasi nonlaba yang dilakukan secara partisipatif menghasilkan peningkatan akuntabilitas yang lebih signifikan dibandingkan pelatihan pasif. Demikian pula, Arliansyah et al. (2024) dalam pengabdian di Pondok Pesantren Darul Falah Aceh Utara menyimpulkan bahwa keterlibatan aktif peserta selama pelatihan merupakan faktor kunci yang menentukan kedalaman transfer pengetahuan akuntansi kepada pengelola lembaga nonlaba.

Perubahan Sosial: Dari Literasi Menuju Transformasi Kelembagaan Secara teoritis, perubahan yang terjadi dalam kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan kerangka transformasi sosial berbasis pendidikan kritis sebagaimana dikembangkan oleh Freire (2000). Dalam kerangka ini, peningkatan literasi keuangan yang terjadi bukan sekadar penambahan pengetahuan teknis, melainkan merupakan bagian dari proses conscientization yang lebih luas yakni tumbuhnya kesadaran peserta tentang kondisi tata kelola lembaga mereka dan munculnya motivasi untuk mengubahnya. Proses ini penting karena perubahan kelembagaan yang berkelanjutan pada hakikatnya hanya dapat terwujud jika anggota komunitas telah memiliki kesadaran dan motivasi internal untuk berubah, bukan karena dorongan eksternal semata.

Dalam pesantren, transformasi tata kelola keuangan memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekadar kepatuhan terhadap standar akuntansi. Laporan keuangan yang akuntabel merupakan perwujudan konkret dari prinsip amanah dalam Islam yakni kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (Mulawarman, 2020). Dengan demikian, peningkatan kapasitas pelaporan keuangan yang dihasilkan dari kegiatan ini bukan hanya bernilai teknis-administratif, tetapi juga memiliki resonansi etis dan spiritual yang mendalam bagi komunitas pesantren.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan

Keterbatasan Kegiatan dan Implikasi untuk Pengabdian Lanjutan. Meskipun kegiatan ini menghasilkan capaian yang bermakna, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, pelaksanaan dalam satu sesi setengah hari menyebabkan materi hanya dapat disampaikan pada level pengenalan, tanpa sempat mendalami aspek teknis penyusunan seluruh komponen laporan keuangan secara lengkap. Kedua, tidak tersedianya instrumen evaluasi formal seperti pre-test dan post-test menyebabkan peningkatan pemahaman peserta hanya dapat dinilai secara kualitatif berdasarkan observasi dan dinamika diskusi. Ketiga, keberlangsungan penerapan ISAK 335 secara mandiri oleh pesantren setelah kegiatan berakhir belum dapat dipastikan tanpa mekanisme pendampingan lanjutan.

Keterbatasan ini sekaligus menjadi basis rekomendasi untuk pengabdian lanjutan. Purba et al. (2023) menemukan bahwa pendampingan akuntansi pada lembaga nonlaba yang dilaksanakan secara berkelanjutan bukan hanya dalam satu

kali pertemuan menghasilkan kemampuan penerapan yang jauh lebih kuat dan lebih tahan lama. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian berikutnya perlu dirancang dalam format pendampingan multi-sesi yang mencakup praktik penyusunan laporan keuangan secara lengkap, evaluasi terstandar, serta mekanisme tindak lanjut berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan ISAK 335 di Pondok Pesantren Nurussunnah Bulukumba.

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai ketiga tujuan yang ditetapkan. Pengurus yayasan dan pengelola keuangan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurussunnah Bulukumba memperoleh pemahaman dasar yang komprehensif mengenai ISAK 335 sebagai standar akuntansi entitas nonlaba, mencakup konsep klasifikasi aset neto serta lima komponen laporan keuangan yang wajib disajikan. Lebih dari sekadar transfer pengetahuan teknis, kegiatan ini mendorong terjadinya pergeseran kesadaran peserta dari memandang laporan keuangan sebagai kewajiban administratif semata menuju pemahaman bahwa laporan keuangan yang tertib dan terstandar adalah fondasi tata kelola pesantren yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pergeseran ini mencerminkan proses conscientization sebagaimana dikonseptualisasikan Freire (2000), yang menjadi prasyarat bagi terjadinya transformasi tata kelola kelembagaan yang sejati. Secara teoritis, kegiatan ini mengkonfirmasi efektivitas pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam mendorong perubahan kapasitas dan kesadaran pengelolaan keuangan lembaga nonlaba berbasis komunitas, sekaligus memperluas jangkauan implementasi ISAK 335 ke lembaga pesantren di wilayah Sulawesi Selatan yang selama ini belum banyak terjangkau oleh program penguatan kapasitas akuntansi.

Guna memastikan keberlanjutan dan pendalaman hasil kegiatan ini, tiga rekomendasi diajukan. Pertama, perlu dirancang program pendampingan lanjutan dalam format multi-sesi yang mencakup praktik penyusunan seluruh komponen laporan keuangan ISAK 335 secara lengkap, disertai instrumen evaluasi formal berupa pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan kapasitas peserta secara terukur, mengingat perubahan praktik kelembagaan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai dalam satu kali intervensi (Purba et al., 2023). Kedua, perlu dikembangkan mekanisme pendampingan berkala minimal satu kali per semester guna memastikan Pondok Pesantren Nurussunnah Bulukumba mampu menerapkan ISAK 335 secara mandiri dalam pengelolaan administrasi keuangan sehari-hari. Ketiga, model pelatihan berbasis PAR yang telah dikembangkan dalam kegiatan ini direkomendasikan untuk direplikasi pada pesantren dan yayasan pendidikan keagamaan lain di Sulawesi Selatan melalui skema kolaborasi Program Studi Akuntansi FEB UNM dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sehingga dampak penguatan tata kelola keuangan lembaga nonlaba dapat menjangkau komunitas yang lebih luas secara sistematis.

#### Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurussunnah Bulukumba atas kepercayaan dan partisipasi aktif seluruh peserta selama kegiatan berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada Program Studi Akuntansi (S1), Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar atas dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

#### References

- Arliansyah, Naz'aina, & Abubakar, J. (2024). Pelatihan pengelolaan dan pelaporan keuangan pondok pesantren Darul Falah. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(2), 254–260. <https://doi.org/10.29103/jmm.v3i2.18879>
- Baitus Salamah, Wildan, & Wildaniyati. (2023). Implementasi laporan keuangan organisasi nonlaba berdasarkan ISAK 35 (studi kasus pada Pondok Pesantren Az-Zabur Kajen Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 4(1), 65–76. <https://www.researchgate.net/publication/371510887>
- Burns, A. (2015). *Action research in the language classroom*. Cambridge University Press.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). (2020). *ISAK 335: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.)*. Continuum.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Pustaka Pelajar.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Statistik pendidikan Islam 2022/2023. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. <https://satudata.kemenag.go.id>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Listiyowati, L. (2021). Kajian penerapan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) 35 pada pondok pesantren. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 168–182. <https://doi.org/10.37252/annur.v13i2.146>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulawarman, A. D. (2020). Akuntabilitas pesantren: Antara normatif dan realitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(2), 103–118.
- Muthya, R., Nisa, F., & Cempaka, A. G. (2024). Penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35 untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Masjid Atlas Bandung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 4(4), 1047–1056. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1274>
- Purba, S., Napitupulu, J., Pasaribu, D., Simbolon, S. I., Gracella, S., Manullang, N., & Natalia, V. (2023). Implementasi ISAK 35 laporan finansial organisasi non laba pada panti asuhan Terang Fajar. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1411–1420. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i2.4849>
- Safitri, R. N., & Narasti, M. (2023). Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sesuai ISAK 35 pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(2), 1781–1789. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i3.1442>